

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efesiensinya dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 18 A ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintahan daerah diatur disana dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang undang. Dengan demikian, pasal ini merupakan landasan filosofi dan landasan konstitusional pembentukan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Wilayah Negara Indonesia sangat luas dan terdiri dari berbagai satuan daerah yang memiliki sifat-sifat khusus tersendiri. Adalah sulit bagi pemerintah untuk dapat melihat dan menangani masalah-masalah yang ada di pelosok - pelosok daerah tersebut. Masyarakat daerahlah yang sesungguhnya mengetahui

kepentingan serta aspirasi mereka, maka idealnya mereka jugalah yang tentunya dapat mengatur dan\mengurus kepentingannya secara efektif dan efisien. Sedangkan pemerintah pusat memberikan dorongan, bimbingan dan bantuan jika diperlukan. Dengan demikian daerahdirangsang dan diharapkan untuk senantiasamengembangkan kemampuannya agar dapat melaksanakan dan mengembangkan kemampuannya agar dapat melaksanakan pembangunan di daerahnya selaras dengan tuntutan dan kepentingan yang ada di daerahnya, serta berdasarkan prakarsa atau inisiatif sendiri.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Basis otonomi daerah adalah daerah kabupaten dan daerah kota yang didasarkan asas desentralisasi. Sedangkan daerah Propinsi merupakan wakil pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan administratif yang mencakup lintas kabupaten dan kota. Dengan di tetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengisaratkan adanya pelimpahan wewenang yang semakin besar, sehingga setiap daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya masing-masing. Dengan demikian ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat harus dikurangi secara bertahap.

Desentralisasi pada dasarnya adalah pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari institusi/ lembaga/pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga/fungsionaris

bawahannya sehingga yang disertai/dilimpahi kekuasaan wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu tersebut.

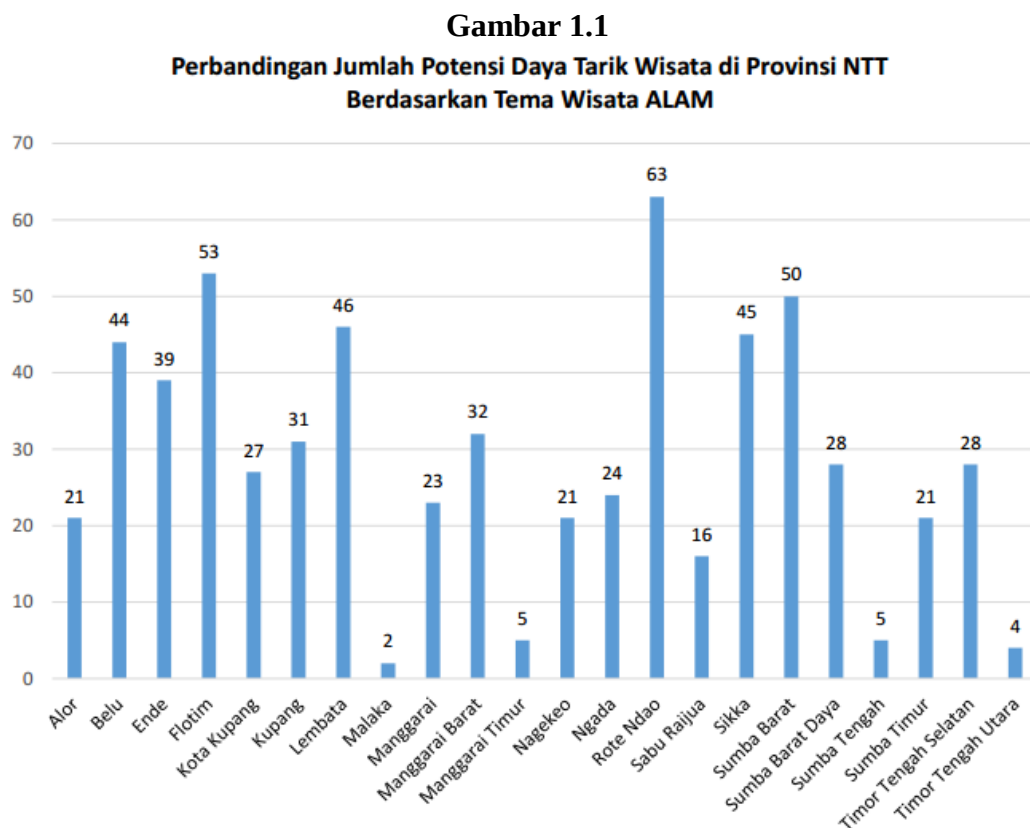
Sumber pendapatan daerah dalam arti luas adalah pendapatan yang meliputi pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah sendiri dan pendapatan dari pemerintah pusat. Sedangkan pendapatan daerah dalam arti sempit adalah penerimaan sendiri (PAD). Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :
 - a. Hasil pajak daerah;
 - b. Hasil retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sektor pariwisata selain untuk meningkatkan devisa negara diharapkan juga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja. Obyek-obyek wisata perlu dikembangkan secara professional sehingga mampu menarik wisatawan asing maupun domestik. Hal ini membuat sektor pariwisata semakin penting perannya dalam ikut serta menjalankan roda pembangunan Indonesia. Indonesia dikenal mempunyai keindahan alam, kebudayaan, adat istiadat, dan sebagainya, semuanya itu dapat digunakan sebagai modal utama untuk mengembangkan sektor pariwisata. Sektor ini diharapkan menjadi penghasil

devisa setelah minyak dan gas bumi, untuk itu pemerintah semakin giat menggarap potensipotensi pariwisata yang ada di seluruh Indonesia.

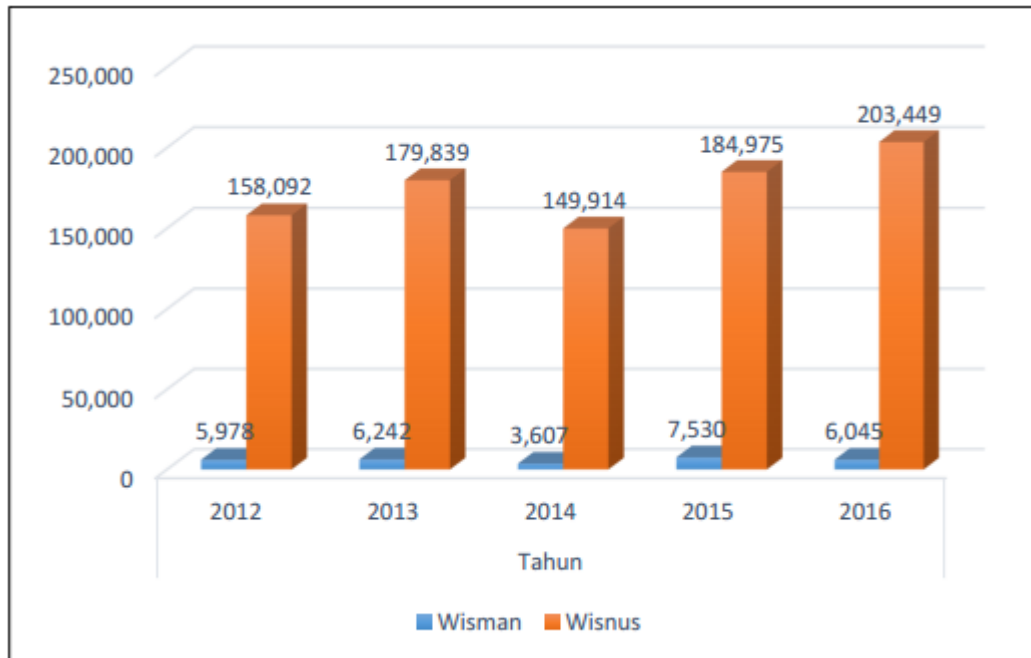
Propinsi Nusa Tenggara Timur tidak saja hanya dikenal sebagai daerah multi pulau dan ragam etnis, tetapi dikenal pula sebagai daerah yang memiliki potensi panorama alam laut dan pantai, gunung dan lembah serta keragaman kultur budaya yang menghiasi suku-suku bangsa bangsa/penghuni Nusa Flores, Sumba, Timor, Alor , Rote, Sabu dan Lembata atau yang disebut FLOBAMORA.



Sumber :Dinas Pariwisata Provinsi NTT Tahun 2016

Sektor pariwisata mempunyai potensi yang sangat besar namun belum diolah dan dikelola secara sungguh-sungguh dan professional yang meliputi obyek wisata bahari, wisata pantai, panorama alam dan wisata budaya yang sudah terkenal namun belum dikelola secara maksimal.

Gambar 1.2
Jumlah Wisatawan di Kota Kupang Tahun 2012-2016



Sumber: Dinas Pariwisata Kota Kupang, 2018

Secara umum trend pertumbuhan jumlah wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik yang berkunjung ke kota kupang selama 5 tahun yakni dari tahun 2012-2016 mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan di kota kupang terjadi pada tahun 2014 yakni mencapai 153.521 orang atau berkurang 17% dari jumlah 186.081 orang di tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2015 hingga tahun 2016 jumlah wisatwan ke kota kupang kembali meningkat sebanyak 36% hingga mencapai 209.494 orang.

Tabel 1.1
Pendapatan Sektor Pariwisata Kota Kupang

No	Tahun	Pendapatan sektor pariwisata (Rp)
1	2012	7.819.3108.900
2	2013	11.323.138.400.
3	2014	14.684.655.700
4	2015	18.368.727.200
5	2016	28.937.030.800

Sumber data : BPS Kota Kupang, diolah 2017

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pendapatan pariwisata Kota Kupang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah serta dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing, dengan demikian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Daerah.

Kota Kupang merupakan ibu kota dari Propinsi Nusa Tenggara Timur dan memiliki beberapa obyek wisata pantai yang sangat potensial untuk diolah agar menjadi suatu sumber pendapatan bagi daerah tersebut. Dari data atas maka penulis bermaksud mengambil penelitian melalui skripsi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Sektor Pariwisata Kota Kupang”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan jumlah wisatawan terhadap pendapatan sektor pariwisata kota Kupang?

2. Bagaimanakah perkembangan jumlah hotel terhadap pendapatan sektor pariwisata kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan jumlah wisatawan terhadap pendapatan pariwisata di kota Kupang.
2. Untuk mengetahui perkembangan tingkat hunian kamar terhadap pendapatan daerah kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Propinsi Nusa Tenggara Timur guna meningkatkan pendapatan daerah
3. Sebagai literature yang dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.